

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Unit Analisis/ Observasi

Peneliti memilih seluruh kabupaten/ kota yang terdapat di Provinsi Lampung sebagai sampel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan objek yaitu laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun yang digunakan adalah 2008-2012. Penelitian ini memiliki tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan variabel dependen itu sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan objek penelitian yang akan diteliti, jumlah data laporan keuangan daerah yang terdapat di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pusat pada tahun 2008-2012 ada sebanyak 14 Kabupaten/ Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun penggunaan sampel lebih lanjut bergantung kepada pemenuhan persyaratan, seperti :

1. Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang telah dikukuhkan sejak tahun 2008-2012.
2. Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang telah menyerahkan data laporan keuangan berupa Laporan Realisasi APBD (LRA) tahun 2008-2012 ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung	14
Kabupaten/ Kota yang tidak dijadikan sampel karena mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2010-2012	(4)
Kabupaten/ Kota yang dijadikan sampel untuk diteliti	10
Jumlah sampel keseluruhan selama 2008-2012	50

Sumber: Data diolah peneliti, 2013

Seperti terlihat pada table 4.1 mengenai data untuk sampel penelitian, dijelaskan bahwa sebenarnya terdapat total 14 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung. Namun pada tahun 2010-2012, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji, dan Kab. Tulang Bawang Barat baru dikukuhkan oleh Provinsi Lampung sebagai bagian dari kabupaten/ kota yang terdapat di Provinsi Lampung sehingga tidak dijadikan sampel. Oleh karena itu, jumlah sampel keseluruhan dari kabupaten/ kota yang terdapat di Provinsi Lampung dalam lima periode berjumlah 50.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik dimulai terlebih dahulu dengan melakukan uji normalitas pada setiap variabel untuk melihat variabel mana yang hasilnya tidak normal. Ada beberapa kabupaten/ kota yang tidak memiliki data nilai sehingga peneliti menghilangkan data tersebut agar data yang lain menjadi normal. Setelah data menjadi normal, lalu peneliti memulai pengujian statistik dengan uji statistik deskriptif.

Hasil statistik deskriptif diperoleh setelah melakukan regresi terhadap data penelitian yang belum mengalami seleksi data. Melalui program spss, langkah-langkah memperoleh hasil statistik deskriptif adalah dengan pergi ke menu *Analyze-Descriptive Statistic-Descriptive* lalu centang pilihan *Mean, Std. Deviation, Minimum, dan Maximum*.

Dengan hasil ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai penelitian seperti nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Statistik deskriptif dari 58 kabupaten/ kota yang dijadikan sebagai sample dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Uji Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	50	48.00	400.50	130.8662	69.26487
Pajak Reklame	50	11.10	257.98	121.7110	48.91974
Pajak Penerangan Jalan	50	81.38	188.84	120.0268	20.90459
Pendapatan Asli Daerah	50	10.29	163.78	96.8356	33.08352
Valid N (listwise)	50				

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Dari jumlah sampel yang ada yaitu 50, Pajak Hotel memiliki rata-rata sebesar 130,8662. Nilai tersebut menggambarkan bahwa jumlah penerimaan Pajak Hotel di Provinsi Lampung memiliki rata-rata setiap tahunnya sekitar 130,8% dari total penerimaan Pajak Hotel setiap Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Lampung.

Penerimaan Pajak Hotel menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena hanya satu kota yang bisa menghasilkan Pajak Hotel paling besar dari Kabupaten/

Kota yang lain. Pajak Hotel terbesar dimiliki oleh Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 sebesar Rp.10.530.259.469. Hal ini disebabkan karena Kota Bandar Lampung merupakan pusat ibukota Provinsi Lampung. Sementara itu Pajak Hotel terendah dimiliki oleh Kab. Mesuji pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp.510.000. Hal ini disebabkan karena pemerintah provinsi belum terlalu memaksimalkan pajak-pajak yang dikelola dalam peraturan daerah.

2. Pajak Reklame

Dari jumlah sampel yang ada yaitu 50, Pajak Reklame memiliki rata-rata sebesar 121,7110. Nilai tersebut menggambarkan bahwa jumlah penerimaan Pajak Reklame di Provinsi Lampung memiliki rata-rata sekitar 121,7% dari total Pajak Reklame yang diperoleh Provinsi Lampung.

Pajak Reklame tertinggi dimiliki oleh Kota Bandar Lampung tahun 2012 dengan nilai penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.14.462.490.287. Hal ini dikarenakan Kota Bandar Lampung menjadi pusat dimana telah banyak perusahaan memasarkan produknya di Kota Bandar Lampung karena memiliki konsumen yang mempunyai daya beli tinggi, sehingga banyak perusahaan yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial. Sementara itu Pajak Reklame terendah dimiliki oleh Kab. Mesuji tahun 2011 dengan nilai penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.17.265.000. Hal ini dikarenakan oleh lapangan usaha dari sektor pertanian di Kab. Mesuji memiliki persentase paling besar yaitu 50,08%, dengan demikian daya saing akan barang kebutuhan sekunder sangat rendah. Oleh karena itu, perusahaan sangat

sedikit yang memiliki keinginan memasarkan produknya di Kab. Mesuji karena masyarakatnya memiliki daya beli yang sangat rendah.

3. Pajak Penerangan Jalan

Dari jumlah sampel yang ada yaitu 50, Pajak Penerangan Jalan memiliki rata-rata sebesar 120,0268. Nilai tersebut menggambarkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki rata-rata sekitar 120% dari total penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang diterima Provinsi Lampung. Pajak Penerangan Jalan mampu menyumbang sebesar 17% dari total Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Provinsi Lampung. Dan Kota Bandar Lampung masih menjadi kontributor paling tinggi dalam lima tahun terakhir ini, yaitu sebesar Rp.177.916.535.147. Dengan demikian, Kota Bandar Lampung berkontribusi sebesar 40% dari total penerimaan Pajak Reklame setiap Kabupaten/ Kota yang diperoleh Provinsi Lampung.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata sebesar 96,8356. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki penerimaan rata-rata sekitar 96,8% yang diperoleh Provinsi Lampung setiap tahunnya dari total Pendapatan Asli Daerah setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

Pendapatan Asli Daerah terbesar dimiliki oleh Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 sebesar Rp.298.696.062.085. Hal ini disebabkan karena Kota Bandar Lampung merupakan pusat ibukota Provinsi Lampung, selain itu bidang pariwisata adalah penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kota Bandar Lampung seperti adanya pajak restoran, pajak hotel, dan pajak tempat hiburan. Sementara itu

Pendapatan Asli Daerah terendah dimiliki oleh Kab. Mesuji pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.1.398.757.818. Hal ini disebabkan karena pemerintah provinsi belum terlalu memaksimalkan pajak-pajak yang dikelola dalam peraturan daerah.

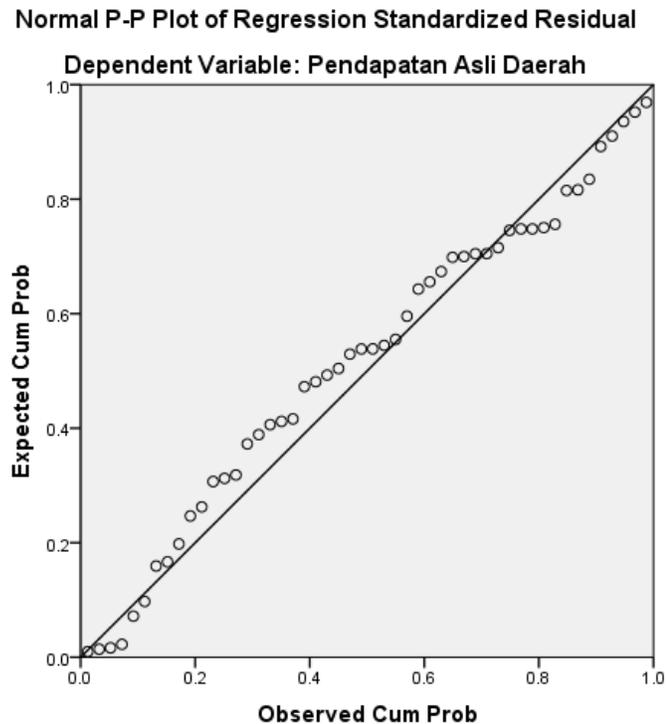
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data bersifat normal atau tidak sehingga dapat dilakukan uji asumsi klasik selanjutnya. Syarat dari uji normalitas adalah data yang digunakan harus berdistribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan memperhatikan penyebaran data (titik-titik) pada *Normal Plot Regression Standardize Residual* dari variabel independen.

Pada awal pengujian normalitas, hasil menunjukkan bahwa distribusi data memenuhi normalitas. Namun peneliti kemudian membuang beberapa *outlier* dikarenakan terdapat data yang tidak normal dibandingkan dengan data yang lainnya. Kemudian pengujian normalitas dilakukan kembali dan menghasilkan data yang tetap dan berdistribusi normal.

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan memperhatikan penyebaran data (titik-titik) pada *Normal Plot of Regretion Standardize Residual* dari variabel independen. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 dari grafik normalitas.



Gambar 4.1
Grafik Normal P-Plot

Sumber: SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Hasil grafik normal P-Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2011, 163) normalitas dapat dideteksi dengan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Untuk lebih meyakinkan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik P-Plot, maka dapat digunakan dengan menggunakan uji Skewness-Kurtosis dan Kolmogorov Smirnov dari nilai residual. Nilai Zskewness dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Z_{\text{skewness}} = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{6} / \text{Jumlah Sample}}$$

Sedangkan nilai Zkurtosis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Z_{\text{kurtosis}} = \frac{\text{Kurtosis}}{\sqrt{24} / \text{Jumlah Sample}}$$

Jika nilai $Z_{\text{hitung}} > Z_{\text{tabel}}$ maka distribusi tidak normal. Z_{tabel} pada signifikansi 0,05 bernilai 1,96. Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh nilai statistik skewness sebesar -0,620 dan statistik kurtosis sebesar 0,725.

Tabel 4.3
Uji Statistik Skewness dan Kurtosis

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	50	-.608	.337	.325	.662
Valid N (listwise)	50				

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Perhitungan untuk memperoleh nilai skewness dan kurtosis adalah sebagai berikut:

$$Z_{\text{Skewness}} = \frac{-0,608}{\sqrt{\frac{6}{50}}} = -1,755$$

$$Z_{\text{Kurtosis}} = \frac{0,325}{\sqrt{\frac{24}{50}}} = 0,469$$

Zskewness dan Zkurtosis memiliki nilai yang lebih kecil dari pada Ztabel yaitu 1,96 sehingga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu, untuk lebih meyakinkan lagi hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik P-Plot, maka dapat digunakan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut ini adalah hasil pengujian menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 4.4
Uji Kolmogorof Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	29.59747852
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.092
	Positive	.077
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Dari tabel diatas, besaran *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,092 dengan tingkat signifikansi 0,200. Tingkat signifikansi di atas 0,05 menandakan bahwa penyebaran data telah terdistribusi secara normal dengan *Kolmogorov-Smirnov*.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Untuk melihat apakah ada atau tidaknya multikolinearitas pada suatu model, salah satu caranya adalah dengan melihat nilai yang dipakai untuk menandai adanya faktor multikolinearitas. Nilai yang dipakai adalah nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10. Jika nilai *tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10 maka telah terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Hotel	.951	1.052
	Pajak Reklame	.889	1.125
	Pajak Penerangan Jalan	.889	1.125

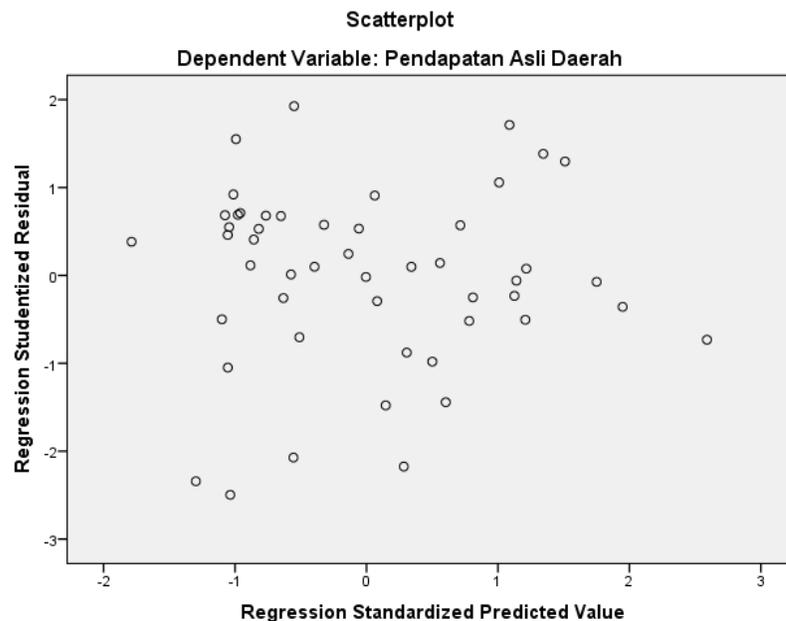
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Dari tabel diatas dapat dipastikan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinieritas karena mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk melihat apakah terdapat masalah heterokedastisitas atau tidak. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji *glejser* ataupun pengamatan dari sebaran titik dalam grafik *scatterplot*. Pengamatan melalui grafik *scatterplot* dilakukan dengan menginput nilai variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID) saat melakukan regresi.



Gambar 4.2 Grafik Scaterplot

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Berdasarkan hasil grafik *scatterplot*, terlihat bahwa sebaran titik berada di kanan dan kiri titik nol, serta di atas dan bawah titik nol. Hal ini menyatakan model regresi

penelitian terbebas dari adanya heteroskedastisitas. Selain melalui pengamatan pada grafik *scatterplot*, heteroskedastisitas dapat diketahui dengan uji statistik *Glejser*.

Uji statistik *Glejser* dilakukan dengan mengabsolutkan nilai residual hasil regresi, setelah itu dilakukan regresi ulang dengan nilai absolut residual sebagai variabel dependen dan hasilnya dapat dilihat melalui tabel *Coefficients*.

Jika hasil signifikansi berada diatas 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel hasil uji *Glejser*.

Tabel. 4.6
Hasil Uji *Glejser*

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	38.931	19.892		1.957	.056
	Pajak Hotel	-.035	.041	-.129	-.868	.390
	Pajak Reklame	-.043	.059	-.110	-.719	.476
	Pajak Penerangan Jalan	-.055	.139	-.061	-.395	.695

a. Dependent Variable: Abres

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Dari hasil regresi nilai residual yang diabsolutkan terhadap variabel independen dapat dilihat bahwa semua nilai signifikansi masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gangguan heterokedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan uji *Durbin-Watson* (DW). Untuk taraf signifikansi 5% dengan $k = 3$ dan $n = 50$ diperoleh $dU = 1,6860$. Berdasarkan data tersebut, diperoleh $4-dU = 2,3140$.

Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Dasar Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Interval		Kriteria
$dW < dL$	$dW < 1,4692$	Ada autokorelasi
$dL \leq dW \leq dU$	$1,4692 \leq dW \leq 1,6860$	Tanpa kesimpulan
$dU < dW \leq 4-dU$	$1,6860 < dW \leq 2,3140$	Tidak ada autokorelasi
$4-dU < dW \leq 4-dL$	$2,3140 < dW \leq 2,5408$	Tanpa kesimpulan
$dW > 4-dL$	$dW > 2,443$	Ada autokorelasi

Setelah dilakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan SPSS 19, hasil yang dapat dilihat pada kolom Durbin-Watson dalam tabel Summary sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.447 ^a	.200	.147	30.54737	1.914

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai dW sebesar 1.914 sehingga berada pada $dU < dW \leq 4 - dU$ yang menunjukkan bahwa model regresi tidak ada masalah autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat melakukan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Yamin, dkk. (2011:29), regresi linear berganda/ majemuk digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih dari satu. Pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X₁ = Pajak Hotel

X₂ = Pajak Reklame

X₃ = Pajak Penerangan Jalan

β₁, β₂, β₃ = Koefisien Regresi

α = konstanta

e = error

Dengan menggunakan metode regresi linear berganda, didapatkan hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.625	31.663		-.241	.811
	Pajak Hotel	.040	.065	.085	.626	.534
	Pajak Reklame	.205	.095	.303	2.168	.035
	Pajak Penerangan Jalan	.618	.221	.391	2.792	.008

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8, dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$Y = -7,625 + 0,040PH + 0,205PR + 0,618PPJ + e$$

Dari persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar $-7,625$ yang artinya Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan tetap (konstan) bernilai 0, maka variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar $-7,625$. Hal tersebut menandakan Pendapatan Asli Daerah tetap akan terjadi sebesar $-7,625$ pada Kabupaten/ Kota tahun periode 2008 hingga 2012.
2. Koefisien variabel Pajak Hotel sebesar $0,040$, artinya ketika Pajak Hotel naik 1 kali dan variabel lain memiliki nilai 0 maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar $0,040$ dengan demikian kenaikan Pajak Hotel sebesar satu kali akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,040$. Hal ini menandakan variabel Pajak Hotel berbanding lurus pada variabel Pendapatan Asli Daerah.
3. Koefisien Pajak Reklame sebesar $0,205$ artinya ketika Pajak Reklame meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka alokasi Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar $0,205$. Angka tersebut dapat diasumsikan setiap peningkatan Pajak Reklame Rp.1.000 diprediksi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Rp.205. Koefisien bertanda positif yang berarti apabila Pajak Reklame bertambah maka Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota juga akan bertambah.
4. Koefisien variabel Pajak Penerangan Jalan sebesar $0,618$, artinya ketika Pajak Penerangan Jalan naik 1 kali maka nilai Pendapatan Asli Daerah daerah naik sebesar $0,618$ yang berarti peningkatan Pajak Penerangan Jalan sebesar satu satuan akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,618$. Hal ini menandakan

variabel Pajak Penerangan Jalan berbanding lurus pada variabel Pendapatan Asli Daerah.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Berdasarkan pengujian dengan SPSS 19 diperoleh *output* Anova pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Anova (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10706.926	3	3568.975	3.825	.016 ^b
Residual	42924.526	46	933.142		
Total	53631.452	49			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Tabel ANOVA menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,016. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai α yang sebesar 0,05 atau 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4.5.2 Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji Statistik t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran yang dipakai adalah dengan menggunakan perbandingan t_{tabel} dengan t_{hitung} . Untuk itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H_0 : variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

H_a : variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat.

Dengan menggunakan SPSS 19, diperoleh *output* sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Statistik t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.625	31.663		-.241	.811
	Pajak Hotel	.040	.065	.085	.626	.534
	Pajak Reklame	.205	.095	.303	2.168	.035
	Pajak Penerangan Jalan	.618	.221	.391	2.792	.008

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa:

1. Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Hotel memiliki efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung periode tahun 2008-2012. Berdasarkan hasil uji t yang

disajikan dalam Tabel 4.9, variabel Pajak Hotel memiliki $t_{hitung} = 0,644$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,534. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($1,671 > 1,025$) dan nilai signifikansi variabel $0,534 > 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan tidak diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Reklame memiliki efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung periode tahun 2008-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, Pajak Reklame memiliki $t_{hitung} = 2,121$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,671 < 2,121$) dan nilai signifikansi variabel $0,035 < 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame sudah efektif dan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, Pajak Penerangan Jalan memiliki $t_{hitung} = 2,853$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,671 < 2,853$) dan nilai signifikansi variabel $0,008 < 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan sudah efektif dan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). Berikut adalah table hasil *output* dari uji koefisien determinasi:

Tabel. 4.12
Koefisien Determinan

Model Summary

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.447 ^a	.200	.147	30.54737

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

Dari tabel diatas dapat terlihat hasil *adjusted* R^2 dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebesar 0,147. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 14,7% dari Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan 85,3% lainnya dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model regresi. Hal ini dikarenakan masih banyak komponen pajak daerah lainnya yang terdapat di Provinsi Lampung, seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga pengaruh variabel-variabel bebas di dalam penelitian ini tidak begitu besar persentasenya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Analisis Efektifitas Pajak Hotel terhadap Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t, dilihat bahwa secara parsial hubungan antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak efektif karenan penerimaannya tidak berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi X_1 yang jauh di atas standar 0,05. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya yang mengatakan bahwa terdapat efektifitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil t-hitung diperoleh jumlah 1,025, sedangkan dalam t-tabel 1,671. Berdasarkan besaran t-hitung $<$ t-tabel maka bisa dipastikan Pajak Hotel berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, Pajak Hotel kurang efektif penerimaannya.

Penelitian ini terbukti sejalan dengan penelitian yang dilakukan Betty Rahayu dan Evi Yulia P. (2010) serta Tengku Rahardian dan Isril (2012), dalam hal ini Pajak Hotel mempunyai pengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kedua penelitian tersebut dilakukan di Kab. Gunung Kidul dan Kab. Pelalawan. Hasil penelitian ini dapat dikatakan sama karena salah satunya memiliki

sampel yang terdiri atas seluruh Kabupaten/ Kota di provinsi dimana penelitian ini dilakukan yang memiliki perbedaan karakteristik satu dengan lainnya.

Penerimaan pajak daerah setiap Kabupaten/ Kota tidaklah sama, setiap daerah memiliki prioritas pajak daerah mana yang paling berpotensi untuk menghasilkan penerimaan yang besar untuk daerah mereka. Begitu juga dengan Pajak Hotel, pada saat membuat anggaran dan menentukan target potensi yang ada, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas jenis pajak daerah mana yang ingin diprioritaskan.

Banyak faktor yang mengindikasikan Pajak Hotel di Provinsi Lampung tidak efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya adalah masalah perizinan, masih banyak hotel di Provinsi Lampung yang belum memiliki Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Selain itu, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga menjadi salah satu penyebabnya. Banyak hotel yang hanya memiliki IMB untuk bangunan rumah atau pertokoan, melainkan bukan untuk hotel. Dengan demikian, hotel-hotel seperti ini telah melanggar UU No.28/ 2002 tentang Bangunan Gedung, serta UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diturunkan melalui Perda No.7/2011 tentang Retribusi Izin Tertentu, serta Peraturan Walikota (Perwali) No.40/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan IMB/ Pencabutan IMB.

Akibat pelanggaran tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara tidak langsung mengalami kerugian lantaran mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Sebab, baik pajak maupun retribusi yang disetorkan pihak hotel ke Pemerintah Daerah, tentunya disesuaikan dengan fungsi bangunan yang mengacu pada IMB lama. Artinya, para wajib pajak tersebut selama ini membayar pajak dan

retribusinya untuk rumah atau pertokoan, sementara bangunan yang mereka miliki adalah hotel. Oleh karena itu, besaran pajak dan retribusi antara rumah atau pertokoan dan hotel itu sangat jauh berbeda.

4.7.2 Analisis Efektifitas Pajak Reklame terhadap Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis kedua (H_2) yang mengatakan bahwa terdapat efektifitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga H_2 diterima. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, Pajak Reklame memiliki $t_{hitung} = 2,121$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,671 < 2,121$) dan nilai signifikansi variabel $0,035 < 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame sudah efektif karena berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Reny Rinawati (2012) yang menyatakan Pajak Reklame di Kota Surabaya mempunyai pengaruh negatif atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Tati Siti Nurzanah (2012) yang menyatakan bahwa pendapatan Pajak Reklame secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya. Ini berarti setiap

peningkatan penerimaan Pajak Reklame akan berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan begitupun sebaliknya.

Pajak reklame adalah salah satu pembentuk dari penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran reklame selalu dibayang-bayangi oleh tiga bentuk kepentingan yaitu yang pertama, reklame sebagai penyumbang pendapatan daerah (fungsi *budgetair*), kedua yaitu reklame sebagai elemen estetika perkotaan (fungsi *regulerend*) dan yang ketiga adalah reklame sebagai komoditi bisnis bagi para pengusaha. Dalam ilmu marketing terdapat pemasaran yang dipakai dalam bauran pemasaran yang dipakai sebagai instrumen kebijakan perusahaan. Salah satu bauran pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan.

Setiap jenis pajak memiliki potensinya masing, Pajak Reklame sebagai salah satu Pajak Daerah dalam pengelolaannya perlu diadakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tombak pembangunan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Provinsi Lampung mengalami perkembangan dari tadi tahun ke tahun dalam bidang pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan yang ada. Salah satunya semakin meningkatnya jumlah swalayan besar (*mall*) dan

usaha-usaha menengah kebawah, misalnya seperti minimarket, toko dsb. Dengan perkembangan yang ada, masyarakat berlomba-lomba mendirikan usaha mereka masing-masing. Agar usaha atau produk mereka dikenal oleh masyarakat luas, merekapun berlomba-lomba memakai jasa reklame untuk memasarkan usaha atau produk mereka kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, ada satu perkembangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Lampung yang memberikan dampak terhadap jumlah pajak yang diterima oleh pihak Pemerintah Daerah di provinsi ini, dikarenakan ada banyak model bisnis dan atau usaha yang dijalankan di Provinsi Lampung pada saat ini dan hampir semua pemilik bisnis tersebut mempergunakan bangunan reklame sebagai suatu media penting dalam mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat di provinsi ini. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak reklame di Provinsi Lampung, sehingga pendapatan pajak reklame menjadi meningkat.

4.7.3 Analisis Efektifitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan

merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Tingginya penerimaan Pajak Penerangan Jalan disebabkan oleh penerimaan dari pajak tersebut sudah sesuai dengan potensi riil yang dimiliki sehingga pertumbuhannya cenderung tinggi.

Dari hasil statistik deskriptif dapat terlihat bahwa dari jumlah sampel yang ada yaitu 50, Pajak Penerangan Jalan memiliki rata-rata sebesar 120,0268. Nilai tersebut menggambarkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki rata-rata sekitar 120% dari total penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang diterima Provinsi Lampung. Pajak Penerangan Jalan mampu menyumbang sebesar 17% dari total Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Provinsi Lampung. Dan Kota Bandar Lampung masih menjadi kontributor paling tinggi dalam lima tahun terakhir ini, yaitu sebesar Rp.177.916.535.147. Dengan demikian, Kota Bandar Lampung berkontribusi sebesar 40% dari total penerimaan Pajak Reklame setiap Kabupaten/ Kota yang diperoleh Provinsi Lampung. Jumlah ini cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi yang terdapat di Provinsi Lampung, sehingga penerimaan Pajak Penerangan Jalan akan tetap meningkat setiap tahunnya.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan melalui variabel Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah, memiliki tingkat efektifitas yang cukup tinggi karena Pajak Penerangan Jalan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa terdapat efektifitas Pajak Penerangan Jalan

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut terbukti dengan berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, Pajak Penerangan Jalan memiliki $t_{hitung} = 2,853$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,671 < 2,853$) dan nilai signifikansi variabel $0,008 < 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan sudah efektif dan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tati Siti Nurzanah (2012) yang mengemukakan bahwa Pajak Penerangan Jalan secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya. Tetapi penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ebit Julitawati, dkk. (2008) yang mengemukakan bahwa hasil perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan pajak di Kota Bukittinggi belum efektif, yaitu pada tahun 2007 hingga tahun 2009 dan pada tahun 2011, sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan belum mencapai potensi yang optimal. Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi.

4.7.4 Analisis Efektifitas Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uji F, menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,016. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai α yang sebesar 0,05 atau 5%. Hal ini

mengindikasikan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Pada uji tersebut, hasil *adjusted R²* yang menjadi tolak ukur pengaruh variabel independen secara simultan menunjukkan hasil 0,147. Hal ini mengandung makna bahwa sebanyak 14,7% variabel dependen dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen, sedangkan 85,3% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dan tidak diteliti berdasarkan model regresi penelitian ini.

Jika Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, meskipun Pajak Hotel tidak signifikan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal itu bukan menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menurunkan target Pajak Hotel yang terdapat di Provinsi Lampung, sehingga di tahun kemudian Pajak Hotel dapat berpengaruh signifikan.

Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah melalui sektor Pajak Reklame, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki strategi tertentu. Diantaranya melalui kegiatan intensifikasi yang meliputi pendataan Pajak Reklame dan potensi Pajak Reklame di Provinsi Lampung, melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak yang reklamenya terpasang atau telah habis masa berlakunya, serta mengadakan sosialisasi dengan wajib pajak.

Dengan adanya pemerakaran daerah di Provinsi Lampung yaitu terbentuknya Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang berdampak positif bagi pendistribusian aliran listrik keseluruh masyarakat Lampung. Untuk tetap

mendapatkan pendapatan daerah yang besar khususnya dari pajak penerangan jalan, maka setelah adanya pemekaran daerah, Pemerintah Provinsi Lampung segera membuat strategi dan kebijakan yang dianggap perlu, baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi. Strategi dan kebijakan tersebut diantaranya mencari wajib pajak yang bersembunyi dan belum terkena kewajiban pajak, dan Pemerintah Provinsi Lampung harus secara intens pajak mengungkapkan pelaporan pajak yang tidak benar dan tidak dilakukan oleh wajib pajak.